

ISLAM WASATHIYAH DALAM GAGASAN POLITIK ISLAM: MENGUAK PEMIKIRAN ISLAM WASATHIYAH KH ABDURRAHMAN WAHID

Raha Bistara, Mega Alif Marintan

*Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Fakultas Adab dan Bahasa,
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia*
rahabistara07@gmail.com, mega.alifmarintan@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang majemuk dan memiliki berbagai macam budaya, suku, ras, agama dan lain sebagainya. Menjadikannya negara yang plural dan penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam menghadapi kemajemukan konsep Islam wasathiyah menjadi penting untuk di implementasikan dimasa sekarang. Terlebih lagi mengenai permasalahan politik khususnya Islam akan lebih kompleks. Melihat tersebut Abdurrahman Wahid sebagai cendekiawan muslim memberikan perhatian untuk menciptakan suasana damai ditengah perbedaan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *library reaserch*. Berarti penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang mana sumber data bersumber dari pustaka. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan historis, hal tersebut berguna untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep Islam wasathiyah Abdurrahman Wahid. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dipaparkan Abdurrahman Wahid merupakan tokoh cendekiawan muslim yang berasal dari lingkungan pesantren. Kedua kakenya merupakan ulama yang cukup terkenal dan Kyai sepuh Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai orang yang lahir dari keluarga pesantren ia paham betul mengenai ilmu kegamaan. Salah satunya ia berpendapat bahwa Islam wasathiyah merupakan tengah-tengah, tidak bersikap ekstrim. Konsep Islam wasathiyah ini penting diterapkan di Indonesia yang plural. Gagasan politik Islam Abdurrahman wahid juga sangat relevan diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk membendung gerakan-gerakan politik Islam yang ingin menerapkan sistem khilafah Islamiah. Sistem yang sebetulnya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Walaupun Indonesia menjadi negara dengan mayoritas umat muslim. Namun tidak dapat dipungkiri masih ada umat agama lain yang hidup di Indonesia. Sehingga bersikap moderat dan berlaku adil dalam hidup berbangsa dan bernegara menjadi syarat wajib dalam upaya menjaga perdamaian di Indonesia khususnya dan perdamaian dunia pada umumnya.

Kata kunci: Abdurrahman Wahid; Islam Wasathiyah; Politik Islam; **Pendahuluan** Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari etnis, suku, budaya, bahasa dan agama. Fakta demikian yang kemudian memunculkan term baru terhadap negara Indonesia yakni negara plural dan multikultural (Wahyudi & Kurniasih, 2021). Kementerian agama pernah melakukan riset mengenai keberagaman yang ada di Indonesia.

Dengan fakta bahwa tidak hanya enam agama yang berkembang di negara Indonesia melainkan lebih dari ratusan bahkan ribuan suku dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Tapi, walaupun demikian mayoritas agama yang dianut di Indonesia adalah Islam.

Dengan melihat hal demikian sudah barang tentu Islam menjadi sorotan dibandingkan dengan agama yang lain. Maka, posisi umat Islam harus berhati-hati dalam bersosial-keagamaan dengan umat yang lain. Maka dengan posisi yang demikian, umat Islam memiliki konsep yang baku dalam beragama, yakni konsep Islam Wasathiyah. Wasathiyah merupakan konsep yang berasal dari epistemologi Islam. dalam hal ini wasathiyah diartikan sebagai penengah di antara dua hal yang saling berhadap-hadapan (Irawan, 2017). Wasathiyah dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai bentuk keseriusan, ketersinambungan dengan penuh komitmen.

Melihat hal demikian, dalam negara plural dan multikultural seperti Indonesia, pola wasathiyah ini perlu digerakkan dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. terlebih ketika berbicara mengenai politik Islam (Azra, 2012). Seperti yang kita pahami bersama politik Islam berorientasi kepada politik dan kekuasaan. Artinya dengan begitu umat Islam harus bisa menerapkan konsep wasathiyahnya ketika menggerakkan politik Islam yang dikembangkan di negara Indonesia.

Tanpa adanya konsep wasathiyah ketika berbicara politik Islam, mustahil kiranya gagasan politik Islam yang dikembangkan oleh umat Islam bisa berkembang, tersebar, dan dipahami oleh umat yang lain. Lantaran, mereka juga memiliki gerakan politiknya masing-masing dalam menguasai percaturan politik yang ada di Indonesia (Kasdi, 2015). Abdurrahman Wahid hadir untuk menyibak konsep politik Islam dengan kerangka wasathiyah supaya umat Islam dengan gerakan politiknya bisa diterima di semua lapisan masyarakat umat beragama. Tanpa adanya sintesis baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid, umat Islam dengan politik Islamnya kesulitan untuk menguasai panggung politik yang ada.

Dengan begitu politik yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid, adalah politik manusiawi. Artinya, sesuatu yang mendasar bagi segenap tata dan praktisi politik adalah manusia, sehingga manusia harus menjadi landasan normatif dan muara etis dari tata

pemerintahan. Gagasan Abdurrahman Wahid inilah yang bisa dikatakan gagasan politik Islam dalam ranah filsafat politik. Sebagai cerdekiawan yang pandai dan ulama Abdurrahman Wahid paham betul ketika berbicara soal politik yang ada di Indonesia hanya ada satu cara untuk bisa diterima oleh semua agama, yakni politik kemanusiaan.

Negara Indonesia dengan masyarakat yang majemuk menggunakan rumusan Pancasila dalam berbicara soal kemanusiaan. Untuk itu gagasan Abdurrahman Wahid mengenai wasathiyah perlu diketengahkan di sini. Sebab, dengan melihat urusan politik dan agama, Islam dengan wasathiyahnya harus menyebar ke segala lini masyarakat Indonesia supaya dapat menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Penelitian ini ingin memaparkan gagasan Abdurrahman Wahid terkait dengan Islam Wasathiyah ketika kita berbicara mengenai politik Islam yang ada di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Artinya penelitian ini adalah penelitian pustaka yang mana sumber data penelitian dari data kepustakaan. Data kepustakaan ini berupa buku, artikel ilmiah, majalah, manuskrip dan sumber pustaka lagi yang dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data adalah meneluri berbagai referensi mengenai topik penelitian. Selanjutnya dilakukan klasifikasi untuk mengetahui referensi yang sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis historis.

Pembahasan

- Biografi Abdurrahman Wahid

Kyai Haji Abdurrahman Wahid akrab dengan panggilan Abdurrahman Wahid bernama lengkap Abdurrahman Addakhil. Ia lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar Jombang. Lahir dari keluarga yang kental dengan tradisi pesantren (Nurhidayah, Putra, Putra, Fadhliah, & Rosyada, 2022). Namun sumber lain mengatakan bahwa Abdurrahman Wahid lahir pada 4 Sya'ban atau pada tanggal 7 September 1940. Ia dilahirkan dirumah kakenya yaitu Kyai Bisri Syansuri (S. Arif, 2020).

Ayahnya bernama K.H Abdul Wahid Hasyim yang merupakan putra ulama Indonesia yaitu KH Hasyim Asy'ari. KH Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Sedangkan ibunya bernama Sholichah yang merupakan putri Kyai Bisri Syansuri. Kedua kakenya merupakan ulama yang cukup terkenal di Indonesia, dengan ini membuat Abdurrahman Wahid dikenal oleh berbagai kalangan. Selain itu juga ayahnya Wahid Hasyim merupakan menteri agama republik Indonesia pertama pada era presiden Soekarno.

Abdurrahman Wahid hidup di lingkungan pesantren yang mana hal tersebut membiasakan dirinya untuk dibalut ajaran agama. Berkat hal tersebut dan dibimbing oleh ibunya ia mahir membaca al Qur'an dalam usia 4 tahun. Bahkan ia membacanya dengan tajwid yang baik dan benar. Selanjutnya ia pergi ke Jakarta Pusat tepatnya di Menteng untuk bertemu dengan ayahnya lalu tinggal bersamanya (Hadi, 2015). Di Menteng ini ia mengetahui kehidupan ayahnya yang sebagai menteri agama. Ia juga bertemu dengan kolega-kolega ayahnya membuatnya dapat belajar banyak mengenai ilmu pengetahuan.

Latar belakang pendidikan Abdurrahman Wahid tidak hanya dari lingkungan pesantren saja, namun ia awali dengan masuk pendidikan umum di Jakarta. Pendidikan umum pertamanya di SD KRIS yang ada di Jakarta Pusat, namun tidak sampai selesai. Pada kelas empat ia meneruskan di SD Matraman Perwari. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan dari bangku sekolah Abdurrahman Wahid kecil sudah hobi membaca buku, majalah dan lainnya. Sehingga ia mendapatkan wawasan pengetahuan dari bahan bacaanya tersebut (Anam, 2019).

Pendidikan SMPnya ditempuh di Yogyakarta dan selama di Yogyakarta ia tinggal di rumah Kyai Junaidi salah satu Dewan Penasihat Agama Muhammadiyah. Disana ia juga belajar bahasa Arab dan terkadang tiga kali dalam seminggu ia pergi kepondok pesantren Al Munawir Krpyak yang dipimpin oleh Kyai Ali Ma'shum. Abdurrahman Wahid kecil juga termasuk anak yang cukup bandel dan tidak nurut. Bahkan waktu ia kecil sering digunakan untuk menonton pertandingan sepak bola dan menonton film (Hadi, 2015).

Setelah pendidikan SMP ia tamatkan, selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya di Pesantren Tegalrejo Magelang yang diasuh oleh Kyai Khudori. Setelah selesai di tahun 1959, Abdurrahman Wahid diminta oleh pamannya yang bernama KH Abdul Fatah Hasyim untuk membantu mengurus sekolah di pondok pesantren Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Pesantren yang merupakan asuhan kakeknya KH Bisri Syansuri. Dan disini menurut Muhammad Zairul Haq juga Abdurrahman Wahid belajar ilmu agama kepada kakeknya K.H Masduki, dan KH Abdul Fatah Hasyim (Anam, 2019).

Selanjutnya pada tahun 1963 Abdurrahman Wahid melanjutkan studinya di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Namun ketika masuk kesana, kekecewaan hadir dalam hatinya dikarenakan tidak sesuai yang ia harapkan. Di Al Azhar ini ia masuk ke kelas awal yang mana kelas ini mempelajari ilmu-ilmu dasar dan ilmu bahasa Arab dasar. Sebagai orang yang pandai dalam berbagai ilmu bahkan didukung dengan kemampuan bahasa asingnya merasa bahwa hal tersebut sia-sia saja. Pihak Universitas berargumen bahwa Abdurrahman Wahid masuk ke kelas tersebut dikarenakan ia tidak mempunyai ijazah atau syahadah yang menjadi bukti kemampuannya khususnya dalam bahasa Arab (Mirza, 2010).

Di Universitas Al Azhar Abdurrahman Wahid bertahan selama tiga tahun dan ditahun 1966 ia pindah ke Universitas Bagdad. Menurutnya di Bagdad merupakan dunia yang berbeda dengan Mesir. Ia merasakan suasana intelektual yang berbeda di Bagdad. Bahkan ia semakin bergairah dalam membaca buku-buku karya orang-orang Barat (Mirza, 2010). Menurut Santalia, (2015) Abdurrahman bertemu dengan nuansa intelektual yang lebih sekuler dan mempunyai gaya yang erat dengan budaya Barat.

Pengalaman lainnya yang ia dapatkan adalah belajar bahasa Prancis, dan juga mendalami dunia Tasawuf. Disana ia rutin pergi ke makam-makam tokoh-tokoh dunia yang juga merupakan kebiasanya ketika di Indonesia. Selain itu ia juga belajar tradisi-tradisi yang berkembang dan belajar dengan komunitas Yahudi (Anam, 2019). Abdurrahman Wahid lulus dari Universitas Bagdad di tahun 1970 dan setelah itu ia menghabiskan waktunya untuk berkeliling Eropa pada 1970-1971 dan juga belajar Bahasa Perancis, Inggris dan Jerman

(Santalia, 2015). Setelah berkelana di Eropa Abdurrahman Wahid pada tahun 1971 kembali ke Indonesia.

Perlu diketahui bahwa sebelum pulang ke Indonesia tepatnya pada 11 Juli 1968 Abdurrahman Wahid sudah menikah dengan Sinta Nuriyah putri H Abdul Syukur. Pada saat itu ia tidak pulang ke Indonesia dan pernikahannya diwakilkan oleh kakeknya KH Bisri Syansuri. Dari fenomena tersebut, pernikahan Abdurrahman Wahid menjadi kontroversi. Masyarakat menganggap bahwa mempelai laki-laki merupakan seorang yang sudah tua, yang mana KH Bisri Syansuri terpaut jauh umurnya dengan mempelai wanita yaitu Nuriyah. Namun kesalahpahaman tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat dan tetap dilangsungkan pernikahan (Mirza, 2010).

Pada 11 September 1971 resepsi pernikahan dan setelahnya keduanya hidup bersama. Diawal rumah tangganya, ekonomi keduanya belum mapan dan masih perlu kerja keras untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Bahkan sampai mereka berjualan kacang goreng dan es lilin dan dititipkan di warung-warung sekitar rumah. Namun selain itu juga ia menjadi Dosen dan Dekan Fakultas Ushuluddin di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang (Hadi, 2015).

Di Indonesia Abdurrahman Wahid sebagai sosok yang mempunyai humor dan pembawaan yang ceria. Sebagai akademisi ia juga mempunyai sikap kritis bahkan terkadang dianggap kontroversional oleh berbagai kalangan (Hadi, 2015). Namun situasi itu segera ia cairkan dengan selera humornya atau *guyonan*. Namun pemikiran-pemikirannya dinamis dalam permasalahan agama dan negara. Pemikiran dinamis ini dipengaruhi oleh karakter yang dimiliki oleh pribadinya dan terpengaruhi oleh berbagai budaya dan peradaban dunia selama pengembaraan intelektualnya (Anam, 2019).

Beberapa pengaruh yang ia dapatkan sehingga membentuk kerangka berfikir menurutnya adalah *pertama*, lingkungan pesantren yang mempunyai kultur yang berbeda dengan dunia lain membentuk kerangka berfikir yang agamis bahkan penuh dengan ajaran etika dan adab yang diajarkan oleh kyai kepada para santri. *Kedua*, pengaruh peradaban Timur Tengah yang pernah ia tempuh tentu memberikan sumbangsih dalam membentuk pola

berfikirnya. Bahkan budaya Timur Tengah yang terbuka dan keras menjadikan Abdurrahman semakin bebas dalam meluapkan hasrat intelektual. *Ketiga*, dunia Barat yang mana ia dapatkan dengan membaca karya tokoh-tokoh Barat yang terkadang liberal, sekuler dan rasional (Anam, 2019).

- Politik Islam Indonesia

Berkaitan dengan isu politik Islam yang berkembang di Indonesia, maka bagi Azyumardi Azra harus dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, politik Islam yang dipresentasikan partai-partai Islam yang terlibat dalam sistem dan politik yang sah, mereka berorientasi dalam agenda politik mereka dalam membentuk negara Islam dan menerapkan hukum Islam. Kedua, Islam politik yang ditampilkan oleh beberapa kelompok politik Islam yang memiliki agenda politik yang hampir sama dengan kelompok pertama. Namun, kelompok ini bukan merupakan partai politik sebab mereka tidak mengakui keabsahan sistem yang ada (Azra, 2012).

Islam sendiri mengenal pemerintahan dengan bentuk khilafah atau yang sering disebut sebagai *hukuma*. Istilah *hukuma* dalam bahasa Arab diartikan sebagai pemerintah menjadi pengadil dan pemangku dalam kebijakannya berlaku adil (Akbar, 2018). Fungsi pemerintah terutama menyediakan peralihan pemimpin bukan mempertahankan wewenang. Dalam hal ini ketika berbicara mengenai politik Islam akan adanya suatu miskonsepsi antara pemerintah Tuhan dengan pemerintah rakyat. Karena wewenang sering diidentikkan dengan sifat yang absolut, tak terbatas, wakil Tuhan dan prerogatif. Biasanya yang melakukan demikian adalah kelompok yang ke dua yang tidak masuk dalam partai politik.

Bagi kelompok yang ke dua, ketika berbicara politik Islam, maka sistem yang harus digunakan adalah sistem khilafah islamiyah. Namun, pada kenyataannya, sekarang, masyarakat pada saat ini telah diwarnai dengan pergulatan ideologi keagamaan, etnis, dan nasionalisme kebangsaan yang menyusahakan sistem khilafah islamiyah sulit untuk didirikan. Sentimen etnis dan agama yang yang memicu atau menghambat penerapan khilafah islamiyah terutama di negara plural dan multikultural seperti Indonesia (Bistara, 2021).

Ada tiga alasan yang menyebabkan sistem khilafah islamiyah diterapkan, yakni: pertama, tidak mungkin menemukan rumusan khilafiah islamiyah yang disepakati oleh setiap umat muslim. Kedua, ketika khalifah islamiyah dijadikan wadah untuk menerapkan suatu hukum, maka akan banyak muncul pertanyaan dan itu akan menghambat penerapannya khilafah islamiyah. Ketiga, khilafah islamiyah tidak memiliki akar historis yang kuat ketika ingin dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang berhasil. Dengan ketiga alasan itu, mustahil sistem khilafah islamiyah diterapkan di negara muslim mana pun di dunia ini.

Namun, dalam ideologi gerakannya, terdapat busur keyakinan yang kuat, memiliki ciri khasnya tersendiri bersifat fundamentalisme merupakan skripturalisme berciri khusus. Banyak tokoh besar yang menggaungkan politik Islam demikian seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Bagi Qutb politik Islam harus di tegakkan di atas agama Islam beserta syariatnya (Qutb, 1967). Yang nantinya, mereka akan bisa melakukan kebebasan dalam mengatur pemerintahan Islam sesuai dengan kaidah-kaidah Islam tanpa melihat campur tangan dari umat yang lain.

Sebab, berangkat dari kebebasan tersebut pemikiran Sayyid Qutb akan menjadikan manusia diakui persamaannya. Namun sayangnya, Sayyid Qutb tidak melihat politik Islam yang dikembangkan oleh dia adalah politik bukan untuk semua keyakinan tapi hanya untuk Islam. Ini yang sulit diterima di negara plural dan multikultural seperti Indonesia. Perdebatan wacana politik Islam tentang hubungan Islam dan Negara menjadi pemicu pro dan kontra terhadap pembentukan demokrasi sebagai organ politik Islam yang ada di Indonesia, sehingga tema tersebut menjadi tema yang menarik dan belum terselesaikan hingga sekarang (Basyir, 2016).

Kontroversi ini didasari pada beberapa paradigma Islam dan demokrasi antara lain: pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinasikan dengan demokrasi. Islam yang merupakan sistem politik yang *self-sufficient*. Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara maju seperti Barat, sedangkan Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefeneisikan secara substantif. Ketiga, bahwa

Islam adalah sistem yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi (Sukron, 2002).

Dengan begitu sistem demokrasi pasti akan mendapatkan tantangan dari kelompok islamis yang tidak mau menggunakan sistem demokrasi dengan sebab-sebab yang sudah dijelaskan di atas. Bagi mereka, khilafah adalah satu-satunya sistem politik Islam yang pas digunakan di negara Islam terutama negara Indonesia yang mayoritas muslim. Penolakan ini tentu harus ada suatu gagasan baru supaya sistem demokrasi bisa diterima di semua kalangan khususnya umat Islam. harus ada racikan baru untuk hal itu, maka karena Islam mengenai sistem wasathiyah dalam bernegara dan beragama sudah sepatutnya wasathiyah dikembangkan di negara Indonesia.

- Konsep Islam Wasathiyah

Islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi umatnya dan memberikan petunjuk untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ajaran tersebut bersumber dari al Qur'an dan as Sunnah dan ada beberapa juga yang mempercayai ijma, qiyas sebagai sumber ajaran agama Islam. Salah satu ajarannya adalah wasathiyah yang mengajarkan dan menuntut umatnya untuk berlaku adil, tidak memihak atau dapat diartikan seimbang, serta proporsional (M. K. Arif, 2020).

Sedangkan kata wasathiyah secara etimologi berasal huruf *waw*, *sin* dan *tho* dan berasal dari istilah *wustha*, *wasatha* yang berarti keadilan, pilihan yang terbaik, dan tengah-tengah. Sedangkan al-Asfahani memberi arti pada kata al-wasath berarti titik tengah. Sehingga al-wasath tidak condong ke kiri maupun kekanan (Amar, 2018). Selain itu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pertengahan ini sebagai suatu keseimbangan. Keseimbangan diantara sesuatu yang saling berhadapan (Niam, 2019).

Menurut Satoro dkk kata wasathiyah memiliki kata yang hampir sama dan maknanya saling berkaitan satu sama lain. Pertama, *tawasuth* artinya ia berada pada posisi tengah diantara dua hal yang berbeda. Namun keduanya dipertemukan di tengah untuk menghindari benturan atau pertentangan dikarenakan perbedaan tersebut. Kedua, *mulazamau al-adli wa al 'itidal*

artinya bahwa perlu untuk menjaga keseimbangan supaya tercipta keadilan antara beberapa pihak sesuai dengan porsinya masing-masing. Ketiga, *Afdhaliyyah* artinya mengambil sikap yang tegas, benar dan positif sehingga ditemukan sisi baik dari berbagai pihak (Amar, 2018).

Berbeda halnya dengan Fakhrudin al-Razi menyebutkan ada beberapa makna dari kata wasathiyah. Pertama, wasath yang diartikan adil dan arti ini diambil dari berbagai sumber baik al Qur'an maupun hadis. Dengan kata ummatan wasathan yang diartikan sebagai umat yang adil. Kedua, wasath dapat diartikan sebagai pilihan, Al-Razi lebih condong kepada arti kedua ini. Hal ini disebabkan makna ini paling selaras dengan ayat al Qur'an Surat Ali Imran Ayat 110. Ketiga, wasath diartikan sebagai sesuatu yang paling baik untuk umat Islam. Keempat, wasath diartikan sebagai orang beragama yang memposisikan dirinya di tengah-tengah. Ia tidak bersikap berlebihan atau kekurangan (dalam melaksanakan ajaran agama) (Fitri, 2015).

Selanjutnya pada tahun 2015 Islam wasathiyah mulai disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam dan hal tersebut menjadi terobosan bagi umat Islam. Sehingga diharapkan mampu mencegah gerakan radikalisme di Indonesia (Ikhsan, 2019). Islam moderat atau Islam wasathiyah yang disosialisasikan ini tentunya tidak mudah untuk diimplementasikan. Perlu waktu dan pendekatan yang masih dalam mewujudkan *ummatan wasathan*. Selain umat memahami akan konsep Islam wasathiyah, juga perlu memperhatikan prinsip keadilan dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh para pemimpin, maupun ulama bahkan cendekiawan (Diyani, 2019).

Islam di Indonesia menurut Azumardi Azra mengatakan bahwa sudah menerapkan Islam wasathiyah. Sehingga menurutnya umat Islam Indonesia diharapkan mampu berperan penting dalam mengkampanyekan Islam wasathiyah keseluruh penjuru dunia. Ia juga berpendapat bahwa Islam wasathiyah merupakan sebuah alternatif yang dapat digunakan untuk menjaga perdamaian dunia. Terutama juga dalam dunia Islam untuk kebangkitan peradaban Islam. Maka dari itu para cendekiawan muslim khususnya dan umat muslim pada umumnya harus memberikan perhatian hal tersebut (Komarudin, 2021).

Konsep Islam moderat yang berkembang di Timur Tengah adalah respon adanya gerakan ekstrimisme yang cenderung meningkat. Sehingga para cendekiawan muslim Timur tengah merespon dengan adanya konsep Islam wasathiyah. Akan tetapi mereka mendapat tantangan dalam mengimplementasikan Islam wasathiyah di wilayah Timur Tengah. Hal tersebut menurut Azyumardi Azra disebabkan oleh kekuatan aliran-aliran keagamaan dan sistem kabilah (Diyani, 2019). Kondisi sosial masyarakat, kebudayaan yang berkembang dan kondisi politik di Timur Tengah juga menjadi perhatian dalam mengkampanyekan konsep Islam wasathiyah.

Islam moderat atau Islam wasathiyah ini diharapkan dapat dipahami oleh umat Islam seluruh dunia dan mampu menjawab permasalahan umat Islam. Sebagai cendekiawan muslim perlu upaya yang lebih dalam memelihara umat Islam supaya terciptanya ummatan wasathan (Diyani, 2019). Lebih lanjut mengenai kajian moderasi Islam atau Islam wasathiyah telah mendapat perhatian cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu. Label yang diberikan pad Islam wasathiyah di era kontemporer ini seperti Islam modernis, umat yang progresif dan reformis (Saihu, 2021).

- Islam wasathiyah menurut Abdurrahman Wahid

Sebagai tokoh cendekiawan muslim, khususnya di Indonesia dan dikenal dimanca negara. Abdurrahman wahid juga memberikan perhatian kepada terciptanya umat yang harmonis dan mampu berlaku adil dalam kehidupan manusia. Pemikirannya yang mengarah pada sikap yang plural terhadap kehidupan sosial masyarakat (Nurhidayah et al., 2022). Hal ini disebabkan keinginannya melihat masyarakat hidup berdampingan antar umat beragama.

Istilah Islam wasathiyah sebetulnya di Indonesia tidak terlalu dikenal oleh banyak masyarakat. Mereka lebih mengenal istilah Islam moderat atau moderasi Islam atau moderasi beragama. Sedangkan istilah wasathiyah sebetulnya dinukilkan dari al Qur'an surat al Baqarah ayat 143. Pada ayat tersebut kata wasathiyah diartikan sesuatu yang terbaik dan sempurna (Nurhidayah et al., 2022). Menurut Abdurrahman Wahid ajaran agama Islam bersifat universal dan dapat diimplementasikan di berbagai ruang dan waktu. Namun universalitas ini terletak

pada prinsip ajarannya yang mengajarkan keadilan, kemaslahatan dan mampu menjawab permasalahan masyarakat (Wahyudin, Taufiq, & Islamy, 2021).

Abdurrahman Wahid juga memberikan tekanan pentingnya kesadaran kepada umat muslim untuk senantiasa meresapi nilai-nilai ajaran agama Islam dan dapat mengimplementasikan dalam berbagai kondisi (Wahyudin et al., 2021). Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa umat muslim harus lebih terbuka dan memahami kondisi bangsa Indonesia. Sebagai negara majemuk Indonesia memiliki berbagai keragaman suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Keterbukaan ini menurut Abdurrahman Wahid akan terciptanya rasa toleransi dan kedamaian di Indonesia (Busyro, Ananda, & Tarihoran, 2019).

Kondisi Indonesia yang plural tersebut mendapat perhatian dari Abdurrahman Wahid, dan berbagai upaya ia lakukan untuk menjaga kedamaian di Indonesia. Sehingga pada perkembangannya Abdurrahman Wahid diberi label tokoh pluralisme karena jasanya. Contohnya adalah sukanya ia berdialog dengan berbagai kalangan aliran keagamaan bahkan berbagai umat beragama. Namun pada perjalannya Abdurrahman Wahid mendapatkan berbagai rintangan. Pada awalnya pluralisme kurang mendapat perhatian masyarakat dan bahkan dianggap tidak penting. Sehingga mereka mengabaikan pentingnya menjaga dan menghormati perbedaan (Busyro et al., 2019).

Pluralisme merupakan sebuah aliran ideologi yang percaya bahwa sebuah perbedaan di dalamnya terkandung nilai-nilai positif dan bahkan perbedaan yang sekarang ini tidak dapat kita hindarkan (Nurhidayah et al., 2022). Hal ini bertujuan untuk kita saling mengenal, belajar satu sama lain dan saling menghormati. Tentunya tidak boleh adanya perpecahan yang diakibatkan perbedaan tersebut. Kondisi ini ditakutkan akan menimbulkan peperangan yang merugikan orang yang tidak bersalah.

Sedangkan Abdul Aziz Sachedina berpendapat bahwa pluralisme adalah kata ringkasan untuk merepresentasikan mengenai kondisi dunia yang mana perbedaan setiap individu manusia perlu disadari oleh umat manusia. Selanjutnya dalam dirinya tertanam sikap untuk selalu menjaga ketentraman masyarakat (Busyro et al., 2019). Menurut Abdurrahman

Wahid perlunya keterbukaan akal umat muslim untuk menemukan kebenaran. Dari keterbukaan tersebut akan menimbulkan sikap toleransi dalam diri umat muslim (Busyro et al., 2019).

Dalam hal pluralisme Abdurrahman Wahid menawarkan solusi supaya implementasi paham pluralisme dapat dipahami oleh masyarakat. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Abdurrahman Wahid adalah melalui pendidikan pluralisme. Pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dimaksudkan untuk terbentuknya umat muslim yang memahami terhadap perbedaan sebagai ketetapan Allah Swt. Selain itu juga terciptanya masyarakat yang dapat bekerjasama walaupun berbeda golongan dengannya (Sari & Dozan, 2021). Tentunya kerjasama tersebut terciptanya kemaslahatan bersama.

Dalam pengembangan pluralisme, Abdurrahman Wahid berpendapat perlu adanya sinergi antara tindakan dan pikiran. Artinya dalam bertindak harusnya sikap kita inklusif, tidak memposisikan diri sebagai orang yang sempurna sehingga tidak mau berbaur dengan orang lain, meskipun berbeda golongan (Sari & Dozan, 2021). Sedangkan dalam pikiran manusia tidak diperkenankan berfikir unggul dan memandang rendah golongan orang lain.

Sedangkan mengenai moderasi Islam digunakan untuk strategi merawat umat muslim. Hubungan antara moderasi Islam dan pluralisme merupakan sebuah konsep yang dibangun untuk menciptakan rasa toleransi dan kerukunan dalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kekuatan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya perbedaan bertujuan untuk pengembangan sikap toleran dalam diri manusia dan juga menghargai keanegaram masyarakat. Kita juga menghargai umat agama lain dalam melaksanakan ibadah tanpa mengganggu bahkan mencaci maki (Fuady, Rofiah, & Selvia, 2021).

- Relevansi Islam Wasathiyah Abdurrahman Wahid dalam Gagasan Politik Islam di Indonesia

Sudah waktunya, para pemimpin yang moderat berbicara dengan lantang bahwa interpretasi secara literal terhadap Islam yang menghasilkan ekstremisme dan itu tidak dapat diterima dan ditoleansi oleh nilai-nilai Islam. Sebab, tidak ada alasan apa pun yang

mengharuskan bagi umat muslim untuk melakukan pengrusakan, tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik mereka (Azra, 2012). Artinya pemimpin muslim yang moderat yang mengembangkan Islam Wasathiyah sudah seharusnya turun gunung untuk membendung gerakan semacam demikian.

Melihat Indonesia, sejak kemerdekaanya pada 1945, banyak sekali sistem politik yang ingin diterapkan di negara ini. Mulai dari sistem khilafah, komunisme, sekularisme, sampai dengan demokrasi. Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden ke-empat Indonesia lahir dari kalangan santri yang memahami dengan mendalam gagasan politik Islam maupun politik sekuler. Abdurrahman Wahid melihat kubu sekularis dan Islamis yang masuk dalam tubuh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini adalah mereka yang ingin memisahkan antara Islam dengan politik. Hal ini akan bermasalah, sebab, Islam memiliki aturan hukum jelas, yang bekerja dalam ranah legislasi (S. Arif, 2020).

Pemisahan Islam dari politik akhirnya akan mengakibatkan ketercerabutan politik dari nilai-nilai Islam yang sejak awal sudah ada dan berjalan dengan baik. Kritikanya terhadap sekularis dan Islamis ini yang melahirkan gagasan baru Abdurrahman Wahid terkait dengan etika sosial Islam, yang pada ujung spektrumnya menggambarkan kesatuan Islam dengan politik. Ketika Abdurrahman Wahid mewacanakan pemisahan Islam dan negara secara simbolis-formalis, ia tetap menekankan peranan Islam dalam politik. Tentu peranan Islam ini bersifat etis, karena di dalam Islam terdapat ajaran tentang keadilan sosial. Hal ini yang menandakan Abdurrahman Wahid ada pada posisi pertengahan, karena Abdurrahman Wahid tetap memakai konsep etika sosial Islam sebagai tata masyarakat yang berkeadilan.

Sebagai penunjang peradaban Islam, wasathiyah memposisikan dirinya sebagai bentuk keseriusan, ketersinambungan dengan penuh komitmen untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa memisahkan antara agama dan negara (Mohd Yusof Hj Othman dkk, 2014). Secara teknis, konsep wasathiyah terfokus dalam beberapa hal, seperti: satu, pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan demokratis. Kedua antroposentris dan pertumbuhan ekonomi inklusif berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. ketiga, kepemimpinan dengan integrasi moral yang tinggi, yang membawa perdamaian, keharmonisan

dan kolaborasi dengan kalangan non muslim. Empat, perbaikan pendidikan yang holistik. Lima, kesadaran untuk membangun mental para pemuda muslim. Dan, keseimbangan dan sinergi antara tradisi agama Islam, saintifik, dan proses teknologi (Irawan, 2017).

Melihat fokus kajian yang dikembangkan dalam konsep wasathiyah, tentu pemikiran Abdurrahman Wahid sudah sesuai dengan kriteria di atas. Abdurrahman Wahid sewaktu menduduki kursi kepresidenan sudah menjalankan negara dengan cara demokrasi tanpa menghilangkan ajaran Islam secara sempurna. Bahkan dalam bidang ekonomi, ekonomi yang berdasarkan azaz-azaz Islam dijalankan oleh Abdurrahman Wahid untuk membendung arus perekonomian di Indonesia. Salah satunya Abdurrahman Wahid menginginkan perataan ekonomi, yang itu sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Islam (Ahyani & Nurhasanah, 2020). Namun tanpa mengurangi sedikitpun kaidah ekonomi yang dikembangkan oleh umat selain Islam. Inilah kelebihan Abdurrahman Wahid dalam mengembangkan ekonomi Islam berbasis Islam Wasathiyah.

Abdurrahman Wahid juga memberikan contoh kepada kita melalui konsep wasathiyahnya dalam dunia politik. Sebagai seorang pemimpin Islam yang moderat, dalam menyelesaikan persoalan kenegaraan Abdurrahman Wahid menggunakan konsep wasathiyah, ini terbukti sewaktu Abdurrahman Wahid menyelesaikan sengketa Papua dan mengakui adanya agama Konghucu. Bukti bahwa konsep wasathiyah yang dikembangkan oleh umat Islam yang moderat bisa menyelesaikan dengan mudah persoalan politik keagamaan. Bahkan dalam dunia pendidikan nasional, dengan menggunakan konsep wasathiyah pendidikan yang ada di Indonesia melakukan pemerataan secara menyeluruh, tanpa memandang agama, ras, suku, dan keturunan, semuanya bisa merasakan.

Inilah konsep wasathiyah yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid dalam dunia politik Islam yang ada di Indonesia. Ini berbanding terbalik dengan umat Islam yang radikal, mereka menyelesaikan sesuatu dengan sistem kekerasan yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Memang sudah waktunya konsep wasathiyah yang ada di dalam Islam dikerjakan oleh semua umat Islam untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan, khususnya terkait dengan masalah politik Islam yang merebak di dunia plural dan multikultural seperti Indonesia.

Supaya Islam bisa diterima oleh masyarakat yang lain, kita harus mengikuti jejak langkah Abdurrahman Wahid yang sudah dibulatkan dengan baik dan rapi, tanpa adanya permusuhan dan pertumpahan darah.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara plural memiliki berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Hal ini menjadi tantangan untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Perlu adanya upaya yang masih dalam hal ini salah satunya adalah menerapkan konsep Islam wasathiyah. Islam wasathiyah merupakan tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Ia juga menuntut untuk berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu dalam hidup berbangsa dan bernegara, dunia perpolitikan tidak dapat dihindarkan, khususnya di Indonesia. Dalam hal ini konsep Islam wasathiyah berpeperan untuk menggerakkan politik Islam yang ada di Indonesia. Tanpa hal tersebut kiranya akan mustahil gagasan politik Islam dapat dikembangkan di Indonesia.

Sebagai cendekiawan Abdurrahman Wahid hadir untuk memberikan pemahaman mengenai politik Islam dengan kerangka berfikir Islam wasathiyah. Gagasan politik Islam Abdurrahman Wahid merupakan gagasan politik kemanusiaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya dalam dunia politik yang merupakan pelaku atau praktisi merupakan manusia dan untuk kemaslahatan manusia.

Dalam memberikan perannya di Indonesia politik Islam yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid bersifat etis. Hal tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam untuk berlaku adil dalam kehidupan sosial masyarakat. Konsep etika sosial Islam dipakai untuk membentuk tatanan sosial masyarakat yang adil. Hal tersebut juga diterapkan oleh Abdurrahman Wahid dalam gagasan Islam wasathiyah dalam dunia politik Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>
- Akbar, I. (2018). Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.265>
- Amar, A. (2018). Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 18–37. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i1.3330>
- Anam, A. M. (2019). Konsep Pendidikan Pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 81–97. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v17i1.1442>
- Arif, M. K. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha. *Al-Risalah*, 11(1), 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Arif, S. (2020). Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 73–104. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>
- Azra, A. (2012). Revisitasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 1(2), 233–244. <https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17541>
- Basyir, K. (2016). Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), 339. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.423>
- Bistara, R. (2021). Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim. *Politea*, 4(1), 95. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10466>
- Busyro, Ananda, A. H., & Tarihoran, A. S. (2019). Moderasi Islam (Wasathiyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia. *FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan Dan Kemasyarakatan*, 03(01), 1–12. Retrieved from <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuadurnal/index>

- Diyani, T. (2019). Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan. *SALAM; Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 303–316. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193>
- Fitri, A. Z. (2015). Pendidikan Islam Wasathiyah: Melawan Arus Pemikiran Takfiri di Nusantara. *Kuriositas*, 1.
- Fuady, F., Rofiah, I., & Selvia. (2021). Toleransi Nasaruddin Umar Sebagai Solusi Menanggulangi Radikalisme Atas Nama Agama. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 1–26.
- Hadi, M. K. (2015). Abdurrahman Wahid dan Pribumisasi Pendidikan Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(1), 183–207.
- Ikhsan, M. A. (2019). Al-Quran dan Deradikalisasi Paham Keagamaan di Perguruan Tinggi: Pengarusutamaan Islam Wasathiyah. *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 98–112.
- Irawan, M. D. (2017). Islam Wasatiyyah, Refleksi Antara Islam Modern Dan Upaya Moderasi Islam. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 111–128.
- Kamil Sukron. (2002). *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kasdi, A. (2015). GENEALOGI DAN SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM. *ADDIN*, 9(2), 277–308.
- Komarudin, A. (2021). Kampanye Nilai-Nilai Moderasi Islam Melalui Santri Menulis (Studi Transformasi Media Dakwah di Pesantren Mahadut Tholabah babakan Tegal). *Jurnal Madaniyah*, 11(1), 105–120.
- Mirza, M. (2010). *Gus Dur Sang Penakluk (Sebuah Biografi Singkat)*. Jombang: Pustaka Warisan Islam.
- Mohd Yusof Hj Othman dkk. (2014). *Wasatiyyah: The Way Forward for Islamic hadhari*. ICAS.
- Niam, Z. W. (2019). Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'Alamin: Peran Nu Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai Di Indonesia. *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, 4(2), 91–106.

- Nurhidayah, Putra, A., Putra, D. P., Fadhliah, M., & Rosyada, Y. A. (2022). Moderasi Beragama Perspektif Pluralisme Abdurahman Wahid (Gus Dur). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 360–369. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.15577>
- Qutb, S. (1967). *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. Kairo: Darul Kitab al-,Arabi.
- Saihu, M. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasahiyah Menurut Nurcholish Madjid. *Adragogi*, 3(01), 16–34.
- Santalia, I. (2015). K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi. *Al-Adyaan*, 1(2), 137–146.
- Sari, E. S., & Dozan, W. (2021). Konsep Pluralisme Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). *Ta'limuna*, 10(02), 21–39.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Religious Moderation Literacy as a Realization. *Jurnal Moderasi Beragama*, 01(1), 1–20.
- Wahyudin, Taufiq, A., & Islamy, A. (2021). Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama. *TADBIR: Jurnal Manajmen Dakwah*, 3(2), 2021. Retrieved from <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Tadbir/article/view/4467>